BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI SANKSI HUKUM TERHADAP TINDAK PELECEHAN SEKSUAL OLEH ANAK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Peraturan yang Mengatur Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam

Tindak pidana kesusilaan seperti pencabulan (zina) termasuk dalam salah satu kategori jarimah hudud. Hudud secara etimologi bentuk jamak dari kata "hadd" membatasi (Atabik Ali, 1998: 696). Hudud secara istilah yakni peraturan atau undang-undang dari Allah yang bersifat membatasi atau mencegah yang berkenaan dengan hal-hal yang boleh dan yang dilarang (haram) (Hanafi, 1993: 24). Dimana Jarimah ini merupakan hak Allah secara mutlak. Sanksi hukuman pelaku pencabulan selain dihukum seperti pelaku zina, juga dihukum dengan hukuman Tak'zir sebagai hukuman tambahan atas paksaan kekerasan atau ancaman yang dilakukan untuk mempelancar perbuatan pelecehan seksual.

Sangat tegas hukum Islam telah menentukan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan (zina). Pada dasarnya kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, dikarenakan menyangkut kehormatan manusia. Dalam pandangan Islam soal moral seks tidak sembarangan, maka segala hal yang mendekati zina juga dilarang. Secara garis besar jarimah/tindak pidana di dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah) dibedakan menjadi tiga, yakni: Jarimah Hudud (hudd), jarimah qishash dan

Jarimah Tak'zir yang mengandung delik-delik kesusilaan di dalamnya adalah Jarimah Hudud dan Jarimah Tak'zir, yaitu sebagai berikut (Hendriawati, 2009: 52):

Jarimah Hudud, yakni Jarimah yang ditentukan oleh Allah baik bentuk Jarimahnya maupun hukumannya. Tindak pidana kesusilaan yang termasuk Jarimah Hudud adalah: Zina secara harfiah berarti "fahisyah", yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seseorang laki laki dengan perempuan, yang satu sama lain tidak ada hubungan pernikahan. Para Fuqaha mengartikan zina adalah melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke vagina wanita dinyatakan haram, bukan karena syubhat, tetapi atas dasar syahwat (Hendriawati, 2009: 53).

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

٢

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah kamu merasa belas kasihan kepada keduanya hingga mencegah kamu dalam menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman" (QS. An Nur: 2).

Adapun unsur-unsur zina dalam Fiqh Jinayah adalah sebagai berikut:

- 1) Hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis walaupun hanya sebageaian ke dalam vagina (iltiqa' khitanain), baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar atau tidak
- 2) Wanita yang disenggami itu tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan itu bersifat sah maupun shubhat, seperti perkawinan yang berlangsung tanpa dihadiri dua orang saksi atau tidak mempunyai wali, atau pernikahan yang dibatasi waktunya (termasuk nikah mut'ah) (Yusuf, 2009: 104).

Hukum Islam menjatuhkan suatu sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, diperlukannya minimal empat orang saksi laki-laki yang adil dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terus terang. Contohnya Bayyinah atau Hujjah ialah berupa petunjuk alat bukti. Alat-alat bukti yang paling pokok atau hujjah syar'iyah yang diperlukan dalam sebuah pembuktian adalah (Audah, 1992: 441):

- 1) Iqrar (Pengakuan) yaitu hujjah bagi pelaku memberi pengakuan sendiri
- 2) Syahadah (Kesaksian) yaitu hujjah yang mengenai orang lain
- 3) Qarinah (Qarinah yang diperlukan).

Hukuman dera dan pengasingan dapat dijatuhi terhadap pelaku zina, dilakukan sampai seratus kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun terhadap zina yang dilakukan oleh orang yang belum beristri (ghairu muhsan) dan terhadap korban perkosaan tidak diberikan sanksi karena dia mendapat paksaan beserta ancaman dari pelaku. Pengertian dera yang dikhususkan untuk pezina yang belum menikah, dinyatakan oleh banyak periwayat, diantaranya seperti Ibnu Abbas yang mendengar Umar Bin al-Khattab berkata, bahwa hukum rajam ditegakkan atas pria atau wanita yang berzina sedangkan mereka telah menikah, baik itu dengan adanya bukti yang kuat berupa kehamilan atau pengakuan (Vol. 1, 1985: 221).

Mengenai bukti pengakuan para pemikir Islam memiliki pandangan yang bertolak belakang. Pernyataan Syafi'i dan Malik untuk bukti pengakuan, bila pelakunya dewasa dan berakal yang mengakui perbuatannya itu, maka hukuman harus dijatuhkan. Namun menurut Abu Hanifah, Ahmad, dan Syiah Imamah mengatakan bahwa hukuman tidak dijatuhkan, kecuali pengakuan pelaku diulang-ulang sebanyak empat kali. (Safwat dalam Santoso, 2003: 24)

Ruang lingkup Jarimah Tak'zir, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jarimah Hudud atau Qishash-diyat yang terdapat syubhat, dialihkan ke sanksi Tak'zir
- 2) Jarimah Hudud atau Qishash-diyat yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi Tak'zir
- 3) Jarimah yang ditentukan Al-Quran dan Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya

- 4) Jarimah yang ditentukan Ulul Amri untuk kemaslahatan umat (Irfan, 2013, hal. 143).

Adapun tujuan dari diberlakukannya sanksi Tak'zir, yaitu sebagai berikut (Irfan, 2013: 142):

- 1) Preventif (pencegahan), ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan Jarimah
- 2) Represif (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari
- 3) Kuratif (Islah), Tak'zir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari
- 4) Edukatif (Pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

Tak'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. macam-macam sanksi Tak'zir terdiri dari (Irfan, 2013: 147–160):

- 1) Sanksi Tak'zir yang berkaitan dengan badan, yaitu hukuman mati, dan hukuman cambuk
- 2) Sanksi Tak'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan

3) Sanksi Tak'zir yang berkaitan dengan harta, hukumannya yaitu menghancurkannya, mengubahnya dan memilikinya

Sanksi Tak'zir lainnya, hukumannya yaitu peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan. pemecatan dan pengumuman kesalahan secara terbuka.

B. Teori Pidana Anak

Proses peradilan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana perlu menjadi proses yang berbeda daripada peradilan yang diterapkan pada orang dewasa. sederhana, anak yang terlibat dalam tindak pidana harus mengalami perlakuan khusus selama proses peradilan mereka. Perlakuan khusus tersebut harus dimulai sejak anak tersebut pertama kali terlibat dalam proses peradilan pidana, yang mencakup tahap penyidikan hingga proses pemeriksaan di pengadilan. Seperti yang telah jelas diatur secara tegas dalam ketentuan-ketentuan yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Menurut Pasal 42 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditegaskan bahwa penyidik harus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak dengan suasana yang bersifat kekeluargaan, meminta masukan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan menjaga kerahasiaan selama proses penyidikan terhadap anak yang melanggar hukum. Demikian pula pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan harus dilakukan dengan mengacu pada perlindungan dan kesejahteraan anak.

Beberapa prinsip dasar yang berkaitan dengan anak yang terlibat dalam tindak pidana sebenarnya telah dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam Undang-undang tersebut, terdapat beberapa ketentuan dasar yang mengatur proses hukum yang harus ditempuh terhadap seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana. pengaturan itu antara lain :

1. Seorang anak yang berumur antara 8 tahun dan belum berumur 18 tahun melakukan tindak pidana, sementara ia baru diajukan ke pengadilan setelah berusia 18 tahun, maka ia tetap diajukan ke pengadilan anak, sepanjang anak tersebut belum berusia 21 tahun;
2. Sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup dan hanya boleh dihadiri oleh anak yang bersangkutan, orang tua atau walinya atau orang tua asuhnya, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan atau pihak lain yang diijinkan oleh hakim, akan tetapi putusannya diucapkan terbuka untuk umum;
3. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dapat berupa pidana penjara, kurungan, pengawasan atau pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi;
4. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak adalah $\frac{1}{2}$ dari pidana pokok yang dijatuhkan kepada orang yang dewasa. Jika pidana itu berupa pidana mati atau seumur hidup, maka yang dijatuhkan terhadap anak adalah pidana 10 tahun;
5. Jika seorang anak yang melakukan tindak pidana dan berumur belum 12 tahun, sementara ancaman hukumannya adalah pidana mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak dijatuhkan hukuman: a. dikembalikan kepada orangtua, atau walinya, atau orangtua asuh dari anak tersebut, b. anak tersebut diserahkan kepada Negara

untuk mengikuti Pendidikan dan pembinaan atau latihan kerja, dan menyerahkan anak ke lembaga sosial yang dikelola oleh pemerintah atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;

Perubahan pandangan terkait diskresi yang dimiliki oleh penegak hukum untuk memperlakukan anak sebagai pelaku kejahatan atau pelanggaran dengan cara yang sama seperti orang dewasa, dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM). anak digolongkan sebagai vulnerable group bersama dengan kelompok minoritas, difable, perempuan dan manula dan konteks perlindungannya masing-masing Anak harus tetap dilihat sebagai individu yang rentan menjadi korban, karena mereka belum memiliki pola pikir dewasa dan seringkali masih mencari identitas mereka sendiri. Karena itu, mereka dapat dengan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya di sekitarnya, termasuk budaya melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran, dan seringkali belum mampu membedakan apakah tindakan tersebut ilegal atau tidak.

Dibutuhkan perubahan dalam paradigma kita tentang anak-anak yang terlibat dalam tindak kejahatan atau pelanggaran, di mana kita harus selalu memandang mereka sebagai korban, bukan sebagai pelaku. keterkaitan antara pelaku dan korban kejahatan yang oleh Stephen Schafer didefinisikan sebagai teori *criminal-victim relationship*.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, pandangan yang disampaikan oleh Sellin dan Wolfgang memberikan deskripsi mengenai berbagai tipe korban kejahatan sebagai berikut (Mulyadi, 2004: 114):

1. *Primary victimization* adalah korban individual, jadi korban disini adalah korban perorangan bukan korban kolektif atau kelompok;
2. *Secondary victimization*, maksud dari korban dengan bentuk seperti ini adalah, korbannya badan hukum atau kelompok;
3. *Tertiary victimization* yang menjadi korban adalah masyarakat luas, boleh juga dikatakan, bahwa korbannya abstrak dan tidak berhubungan langsung dengan kejahatan;
4. *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah pelaku sendiri, korban tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri;
5. *No victimization*, istilah ini bukan berarti tidak ada korban. Akan tetapi tidak dapat segera diketahui keberadannya atau posisinya sebagai korban.

Berbeda dengan pandangan dari Sellin dan Wolfgang, Stephen Schafer memiliki kriteria sendiri dalam mengklasifikasikan korban kejahatan. Pengelompokan menurut Stephen Schafer adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2004: 115):

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena potensial. Untuk itu dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban;
2. *Provocative victims*, merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku bersama-sama;

3. *Participating victims*, hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Pertanggung jawaban sepenuhnya berada di tangan pelaku;
4. *Biologically weak victims* adalah kejahatan karena faktor fisik korban. Pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
5. *Socially weak victims* adalah korban yang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Pertanggungjawabannya terletak pada penjahat atau masyarakat;
6. *Self victimizing victims* adalah korban yang dilakukan sendiri (korban semu). Untuk itu pertanggungjawabannya terletak pada korban sepenuhnya karena sekaligus sebagai pelaku;
7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali ada adanya perubahan konstelasi politik.

Schafer menyatakan bahwa korban memiliki tanggung jawab fungsional, yang melibatkan tindakan aktif dalam menghindari menjadi korban, menghindari memprovokasi tindak pidana, dan memberikan kontribusi untuk mencegah terjadinya kejahatan. Kontribusi korban dalam tindak pidana sering disebut sebagai istilah *victim precipitation*.

Jika dilihat dari perspektif kedudukan para terdakwa dalam kasus ini, mereka dapat diklasifikasikan sebagai *mutual victimization* sesuai dengan pandangan Sellin dan Wolfgang atau *self victimizing victims* sesuai dengan pandangan Stephen Schafer. Dalam perspektif normatif, para terdakwa tersebut dianggap sebagai pelaku tindak pidana, karena mereka memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diwajibkan baik dari segi objektif maupun subjektif. Namun, dari sudut pandang viktimologi, para terdakwa tersebut bisa dianggap sebagai *mutual victimization* atau *self victimizing victims*.

Pelaku tidak menyadari bahwa mereka juga menjadi korban dari tindak kejahatan mereka sendiri, dan korban ikut terlibat sepenuhnya dalam kejahatan tersebut karena mereka juga berperan sebagai pelaku. Pola pikir hakim harus dibawa kearah rehabilitasi terhadap anak dan bukan penghukuman. Majelis Hakim dapat mencoba mengkaji kasus ini dengan pendekatan sosiologis, di mana terdapat teori dekriminalisasi yang berpendapat bahwa tindak kejahatan yang tidak mengakibatkan kerugian pada pihak lain, tetapi hanya pada diri pelaku (*crime without victim*), seharusnya tidak dianggap sebagai tindak kejahatan.

Leonard Savitz telah menyatakan bahwa sebuah perbuatan akan dianggap ilegal secara hukum jika memenuhi lima persyaratan. Kelima persyaratan tersebut adalah:

1. *An act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor.*
2. *The act must be legally prohibited at the time it is committed.*
3. *The perpetrator must have criminal intent (mens rea) when he engages in the act.*

4. *There must be a causal relationship between the voluntary misconduct and the harm that result from it.*
5. *There must be some legally prescribed punishment for anyone convicted of the act.* (Leonard dalam Mulyadi, 2004)

Apabila Majelis Hakim tetap berpegang pada tujuannya untuk memberikan peluang kepada terdakwa untuk mengubah ke arah yang lebih baik di masa mendatang, maka sebaiknya Majelis Hakim mencoba menjelajahi potensi pelaksanaan upaya rehabilitasi yang sesuai dengan prosedur hukum yang tersedia bagi para terdakwa.

Pemantauan terhadap keputusan pengadilan adalah hal yang sangat penting. Maka, Oleh karena itu, diperlukan kehadiran pengawas yang berperan aktif dalam setiap tahap peradilan anak (*juvenile justice trial*), baik yang berasal dari Badan Pemasarakatan (BAPAS) maupun yang merupakan pihak independen dari masyarakat sipil (yang dalam kasus ini dapat diwakili oleh organisasi non-pemerintah). Pengawas yang aktif ini akan mencatat segala pelanggaran yang terjadi dalam proses peradilan anak. Laporan hasil pengawasan ini dapat diajukan kepada instansi yang memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran tersebut.

Dalam upaya menjaga hak perlindungan anak dan memastikan keadilan dalam proses peradilan (*fair trial*), terdapat dua jalur advokasi yang tersedia.

Pertama, melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pasal 75 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan dua tugas utama KPAI, yaitu:

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak;
2. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Mencermati isi pasal tersebut maka tugas KPAI dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut;

1. Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
2. Menerima pengaduan dan memfasilitasi pelayanan masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak kepada pihak-pihak yang berwenang.
3. Melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan kondisi pendukung lainnya baik di bidang sosial, ekonomi, budaya dan agama.
4. Menyampaikan dan memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada berbagai pihak terutama Presiden, DPR, Instansi pemerintah terkait ditingkat pusat dan daerah.
5. Mengumpulkan data dan informasi tentang masalah perlindungan anak.

6. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang perlindungan anak termasuk laporan untuk Komite Hak Anak PBB (Committee on the Rights of the Child) di Geneva, Swiss.
7. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

Jika kita meneliti tugas utama KPAI yang telah dijelaskan, terlihat bahwa dalam konteks pelanggaran hak anak, KPAI memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan serupa dengan yang dimiliki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPAI dapat disampaikan kepada penyidik untuk proses lanjutan. Beberapa kemungkinan pelanggaran yang dapat terjadi dalam proses peradilan anak termasuk:

- Ditahan bersama-sama dengan orang dewasa.
- Penyiksaan oleh penyidik Polisi atau petugas Lapas.
- Tidak diberikan hak dasarnya; makan, minum, perawatan kesehatan dan pendidikan.

Kedua melalui pengaduan kepada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran kode etik hakim dan berhak mencabut jabatan hakim yang terbukti melanggar etika hakim, bersama dengan Mahkamah Agung (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung).

C. Kriteria Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

1. Pengertian Anak

Anak adalah generasi penerus yang memegang peranan krusial dalam proses pembangunan masa depan. Dalam penelitian ini, diperlukan pembahasan mengenai kriteria yang menentukan siapa yang dapat dianggap sebagai anak. Berbagai pengertian tentang batasan anak perlu dipertimbangkan dari berbagai perspektif:

- a. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Maka dapat dikatakan bahwa anak diartikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- b. Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan: “Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.” Maka dapat dikatakan bahwa individu yang berusia di atas 18 (delapan belas) tahun tidak dapat dianggap sebagai anak.
- c. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.” Maka dapat dikatakan bahwa yang dianggap sebagai anak adalah mereka yang belum

mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menjalani pernikahan.

- d. Pasal 330 KUHPerdara: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.” Maka dapat dikatakan bahwa seseorang dianggap sebagai anak jika belum mencapai usia 20 (dua puluh) tahun dan belum pernah menikah.
- e. Pasal 1 Konvensi Hak Anak (Ratifikasi Kep Presiden 36 Tahun 1990): "Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat." Maka dapat dikatakan bahwa seseorang dianggap anak jika belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan jika usianya lebih dari 18 tahun, maka orang tersebut tidak dapat dianggap sebagai anak.
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: “Batas usia anak adalah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.” Maka dapat dikatakan bahwa seseorang dianggap anak jika berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Kemudian, Suryana Hamid menyatakan bahwa “*task force on Juvenile Delinquency Prevention*” telah menetapkan bahwa rentang usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana adalah antara 10 (sepuluh) hingga 18 (delapan belas) tahun, menetapkan bahwa batas usia anak mencakup hingga 18 (delapan belas) tahun (Hamid, 2004: 21). Anak diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai kedewasaan. Kedewasaan tersebut melibatkan kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial yang umumnya dimiliki oleh orang dewasa. Mereka adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan, ditujukan sebagai subjek pelaksana pembangunan berkelanjutan, serta sebagai pengendali masa depan negara, termasuk Indonesia.

Berdasarkan pandangan fuqaha, kemampuan berfikir pada seorang anak dianggap dimulai pada usia lima belas tahun. Ketika anak mencapai usia tersebut, dianggap sudah mencapai kedewasaan secara hukum. Imam Abu Hanifah menetapkan batas usia dewasa pada delapan belas tahun; ada riwayat yang menyebutkan sembilan belas tahun untuk laki-laki dan tujuh belas tahun untuk perempuan. Pendapat umum dalam mazhab Maliki sejalan dengan pandangan Abu Hanifah, di mana mereka mengukuhkan usia kedewasaan pada delapan belas tahun, dan menurut beberapa pandangan lainnya, pada usia sembilan belas tahun (Audah, 1992: 253).

Hukum Islam menunjukkan perbedaan dalam menentukan batasan usia anak. Seseorang dianggap telah mencapai baliq atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat berikut:

- a. Telah berumur 15 (lima belas) tahun
- b. Telah keluar air mani bagi laki-laki
- c. Telah datang haid bagi perempuan

Batasan tersebut didasarkan pada perhitungan usia, namun juga mengambil pertimbangan tanda-tanda fisik yang menunjukkan perubahan pada anak, baik itu anak laki-laki maupun perempuan. Dalam pandangan Hukum Islam, seorang anak dianggap belum baliq atau belum berakal jika dianggap belum memiliki kapasitas untuk berbuat atau bertindak.

2. Asas-Asas Pidana Anak

Asas-asas pengadilan anak menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Prakoso, 2013: 95-99), yaitu;

1) Adanya Pembatasan Umur Anak.

Yang bisa dihadirkan dalam sidang pengadilan Anak, telah diatur secara spesifik, yaitu untuk usia 12 hingga 18 tahun dan belum pernah menikah.

2) Adanya Pembatasan Masalah.

Pengadilan Anak hanya menguji perkara anak nakal berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 undang-undang pengadilan Anak.

3) Suasana Pemeriksaan Kekeluargaan.

Dalam proses pemeriksaan dari tahap penyelidikan hingga persidangan perkara anak, diperlukan atmosfer pemeriksaan yang menciptakan suasana kekeluargaan. Harapannya, anak dapat mengungkapkan perasaan, peristiwa, dan latar belakang

kejadiannya dengan jujur, terbuka, dan tanpa rasa takut.

4) Mengharuskan *Splitsing* Perkara.

Jika seorang anak terlibat dalam kegiatan kriminal bersama dengan seorang dewasa, maka anak tersebut harus diadili dalam pengadilan anak dan dipisahkan dari persidangan pelaku dewasa.

5) Ditangani Pejabat Khusus.

Dalam kasus yang melibatkan anak, penanganannya harus dilakukan oleh petugas khusus anak yang memiliki pemahaman dan pendekatan yang mendukung anak, seperti; penyidik anak, jaksa anak, dan hakim anak.

6) Diperiksa Hakim Tunggal.

Pada dasarnya persidangan anak diperiksa hakim tunggal, baik dalam tingkat pertama, banding sampai kasasi.

7) Penahanan Lebih Singkat.

Jika dibandingkan dengan penahanan orang dewasa, durasi penahanan anak lebih pendek. Ketentuan penahanan diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 50.

8) Kehadiran orang tua/wali/orang tua asuh diperlukan dan Pengakuan Pembimbing Kemasyarakatan diakui.

9) Kehadiran Penasihat Hukum.

Jika orang tua/wali diwajibkan untuk hadir, hal yang sama berlaku untuk penasihat hukum, karena keberadaannya sangat penting dan bersifat wajib menurut interpretasi yang imperatif.

10) Hukuman Lebih Ringan.

Pidana penjara bagi anak nakal memiliki durasi paling lama setengah dari hukuman maksimal yang diberlakukan untuk orang dewasa. Jika tindak pidana tersebut terancam dengan hukuman mati atau seumur hidup, maka hukuman penjara yang mungkin dijatuhkan adalah maksimal 10 tahun.

Asas-Asas Peradilan Pidana Anak sejalan dengan ketentuan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu (Prakoso,2013:9599);

1) Pelindungan.

Pelindungan anak mencakup tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melindungi mereka dari bahaya fisik dan/atau psikis.

2) Keadilan.

Keadilan adalah bahwa penyelesaian setiap permasalahan perkara anak harus mencerminkan keadilan yang diterapkan untuk kepentingan anak.

3) Nondiskriminasi.

Nondiskriminasi adalah tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, serta kondisi fisik dan/atau mental.

4) Kepentingan Terbaik bagi Anak.

Kepentingan Terbaik bagi Anak, pentingnya kepentingan terbaik untuk anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan dan pengambilan Keputusan.

5) Penghargaan Terbaik bagi Anak.

Penghargaan Terbaik bagi Anak Bertujuan untuk memberikan kebebasan pada anak juga memfasilitasi perkembangan kreativitas dan kecerdasannya.

6) Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak.

Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak adalah hak asasi yang paling fundamental yang harus dilindungi oleh negara dan semua orang untuk kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

7) Pembinaan dan Pembimbingan Anak.

8) Proporsional.

Proporsional adalah perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batasan kebutuhan, usia, dan situasi anak, sesuai dengan proporsi yang tepat.

9) Perampasan Kemerdekaan dan Pidana sebagai Upaya Terakhir.

Karena pada dasarnya kemerdekaan anak tidak boleh dicabut kecuali dalam situasi yang memaksa untuk kepentingan penyelesaian perkara.

10) Penghindaran Pembalasan.

Penghindaran pembalasan adalah Menghindari pembalasan atau mengurangi usaha pembalasan dalam proses peradilan pidana.

D. Pengertian Pelecehan Seksual

Hasrat seksual merupakan dorongan psikis yang mendorong individu untuk berperilaku aktif. Dorongan ini tidak hanya terkait dengan aktivitas seksual atau hubungan intim, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan nonseksual. Contohnya, dorongan tersebut mampu memotivasi seseorang untuk mencapai prestasi dalam ilmu

pengetahuan, seni, agama, aspek sosial, budaya, tanggung jawab moral, dan sebagainya. Sebagai kekuatan psikis, seks berperan sebagai motivator atau sumber energi untuk bertindak dan berperilaku (Kartono, 1989: 46–47).

Pelecehan seksual tampaknya merupakan istilah baru yang muncul pada tahun 1970-an di Amerika sebagai bagian dari gerakan kaum perempuan. Pada dekade 1980-an, istilah pelecehan seksual telah menjadi umum diadopsi di Inggris. Seiring dengan peningkatan partisipasi perempuan di dunia kerja, tingkat pelecehan seksual cenderung meningkat, baik karena terciptanya peluang yang lebih besar maupun karena laki-laki mungkin merasa terancam dan melakukan pelecehan seksual untuk menjaga dominasinya terhadap perempuan (Kartono, 2003: 189).

Pelecehan seksual dianggap sebagai tindakan intimidasi, karena melibatkan paksaan terhadap seseorang untuk terlibat dalam hubungan seksual atau menjadikan seseorang sebagai objek perhatian seksual tanpa persetujuannya (Collier, 1998: 2). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “pelecehan seksual” dapat dibagi menjadi dua kata, yaitu “pelecehan” dan “seksual”. “Pelecehan” berasal dari kata “leceh” yang artinya merendahkan, menghina, atau membuat sesuatu menjadi tak berharga. Sementara itu, kata “seksual” berasal dari kata “seks”.

Seks sering diinterpretasikan sebagai bentuk kelamin biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, kata “seksual” sebagai kata sifat merujuk pada sifat suatu entitas yang terkait dengan jenis kelamin atau hal-hal yang terkait dengan perbuatan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, serta unsur-unsur lain yang bersifat keinginan atau dorongan seksual. Dengan demikian, pelecehan seksual menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penggabungan dua kata yang mengandung makna merendahkan atau menghinakan kaum perempuan dan terkait dengan perbuatan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, yang melibatkan unsur hasrat atau dorongan seksual.

Dalam pengertian pelecehan seksual ini, banyak diberikan definisi oleh orang dalam berbagai konteks kalimat. Namun, dari beragam pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pelecehan seksual merujuk pada tindakan yang dirasakan tidak menyenangkan oleh korban karena sifatnya yang mengintimidasi, merendahkan, atau tidak menghargai dengan menjadikan seseorang sebagai objek kepuasan seksual. Menurut Soesilo (1996: 212), pelecehan seksual merangkum segala tindakan yang melanggar norma kesusilaan atau perilaku yang tidak pantas, khususnya terkait dengan dorongan nafsu birahi, seperti ciuman-ciuman, sentuhan tidak senonoh pada organ intim, meraba payudara, dan sejenisnya. Korban pelecehan seksual ini umumnya merupakan anak-anak. Hal tersebut diperkuat pada UU Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 4 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjelaskan bentuk tindak pelecehan seksual, seperti persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap Anak.

Dalam konteks hukum Islam, tidak terdapat istilah “pelecehan seksual” karena segala perbuatan yang berkaitan dengan hubungan intim disebut sebagai zina. Zina dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dan harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan. Tindakan hubungan bebas dan segala bentuk perilaku di luar norma agama dianggap sebagai

perilaku yang berbahaya dan dapat mengancam keutuhan masyarakat, sehingga dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al Isra’: 32)(Terjemahnya, 1993: 429).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina mengandung makna sebagai berikut:

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).
- b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya (Bahasa, n.d., hal. 1136).

Dalam hukum Islam, perbuatan zina tidak mempertimbangkan apakah pelakunya sudah menikah atau belum. Semua orang yang terlibat dalam hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan dianggap melakukan perbuatan zina. Definisi zina dapat bervariasi menurut pandangan para ulama. Menurut Sabiq (1995: 90), zina didefinisikan sebagai hubungan sesaat yang tidak bertanggung jawab. Ibnu Rusyd memberikan definisi yang ringkas, padat, dan jelas. Jika suatu tindakan yang terkait dengan hubungan seksual terjadi di luar ikatan pernikahan yang sah, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai zina.

Menurut Ibnu Rusyd (2005: 355), zina merujuk pada setiap hubungan seksual yang terjadi tanpa didasari pernikahan yang sah, tanpa kejelasan status “syubhat” dan tanpa kepemilikan. Secara umum, konsep ini telah diterima oleh ulama-ulama Islam, walaupun mereka memiliki perbedaan pandangan terkait apa yang dianggap sebagai “syubhat” yang dapat menghindarkan hukuman had, dan apa yang tidak dapat menghindarkan hukuman tersebut. Zuhaili (2012: 260) mendefinisikan zina sebagai kegiatan seksual yang melibatkan organ reproduksi yang dilarang, membangkitkan hasrat seksual, dan menetapkan adanya “hadd”.

Kendati seorang pria tidak dapat mencapai ereksi atau mengalami impotensi, tindakan yang melibatkan memasukkan sebahagian atau sejumlah tertentu dari penisnya ke dalam lubang vagina perempuan atau lubang anus pria atau perempuan, bahkan dengan menggunakan kondom, yang tidak sah secara agama. Tindakan zina tersebut tidak memiliki unsur tertentu yang dapat membatalkan hukuman hadd, dan vagina tersebut dapat merangsang hasrat seksual orang yang normal, sehingga hal tersebut dapat menetapkan keberadaan “hadd”.

Audah (1992) mengartikan zina sebagai "Perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai kematangan hukum terhadap kemaluan manusia (wanita) yang bukan merupakan milik sahnya, dilakukan dengan kesadaran dan persetujuan." Pada hakekatnya definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama adalah:

- a. Adanya persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis
- b. Seorang laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada ikatan yang sah.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perzinaan merujuk pada hubungan seksual melalui pertemuan alat vital antara pria dan wanita di luar ikatan pernikahan keduanya. Dalam hukum Islam, perzinaan dianggap sebagai perbuatan yang sangat terkutuk dan termasuk dalam kategori Jarimah. Pandangan ini diterima oleh sebagian besar ulama, walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai hukumannya. Beberapa ulama berpendapat bahwa status perkawinan pelaku tidak mempengaruhi penilaian, baik dilakukan oleh individu yang belum menikah atau yang sudah menikah, selama perbuatan tersebut terjadi di luar batas pernikahan, maka hal itu dianggap sebagai zina dan dianggap melanggar hukum.

Ada perbedaan prinsipil antara definisi zina dalam hukum positif di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dalam hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam, setiap hubungan badan yang diharamkan dianggap sebagai zina, dan pelakunya dikenai hukuman, baik pelaku sudah menikah atau belum menikah. Di sisi lain, hukum positif di Indonesia tidak mengategorikan hubungan badan yang diharamkan sebagai zina. Terkait dengan tindak pidana kekerasan dan ancaman kekerasan untuk melakukan hubungan seksual dengan anak, persyaratan utama adalah adanya individu sebagai pelaku dan bahwa pelaku tersebut melakukan tindakan tersebut dengan kesalahan. Dengan kata lain, untuk dianggap sebagai tindak pidana, harus ada individu sebagai subjek yang melibatkan kesalahan pada pihak tersebut.

E. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Pelecehan seksual merupakan suatu tindak kejahatan yang dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia di istilahkan dengan pelecehan seksual, oleh karena

itu pada umumnya diatur dalam pasal 289 KUHP, dengan ketentuan sebagai berikut “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun” (Hamzah, 2011: 99).

Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barangsiapa merupakan suatu istilah orang yang melakukan
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang artinya melakukan kekuatan badan
- c. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul atau pelecehan seksual, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 ayat (1) yang menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku
- b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam melakukan tindakan pelecehan seksual terdapat unsur paksaan
- d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan pelecehan seksual, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya.

Berdasarkan kedua pasal dari dua undang-undang yang berbeda dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang sengaja, yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pelecehan seksual.

F. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sanksi pidana mengenai perbuatan pelecehan seksual terhadap anak diatur pula di luar KUHP yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan tersebut dalam

Pasal 81 yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).